



**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bengkalis merupakan satu diantara 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan Ibu Kotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi 3 Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Bengkalis selaku Kabupaten Induk, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai (Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999). Pada akhir tahun 2008 atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kabupaten Bengkalis dimekarkan lagi setelah 5 Kecamatan bergabung menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009).

Sebelum Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 11.481,77 KM², yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 175 Desa/Kelurahan. Setelah 5 Kecamatan bergabung dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti maka secara resmi Kabupaten Bengkalis tersisa 8 Kecamatan terdiri dari 102 Desa/Kelurahan dengan total luas wilayah 7.773,93 KM². Adapun delapan Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara terletak di Pulau Rupert, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil terletak di pesisir Pulau Sumatera serta Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir terletak di daratan Pulau Sumatera.

Secara geografis Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi 00° 55'19" - 02° 11' 37" Lintang Utara dan 100° 58'03" - 102° 34'25" Bujur Timur. Posisi ini menempatkan Kabupaten Bengkalis dalam kawasan yang sangat strategis, karena terletak di jalur Pelayaran internasional Selat Melaka, dengan batas wilayah administrasi daerah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Posisi teritorial ini berpengaruh terhadap iklim dan cuaca di wilayah Kabupaten Bengkalis. Secara umum Kabupaten Bengkalis beriklim tropis dengan temperatur setiap tahun antara 26°C – 32°C. Curah hujan rata-rata antara 651,0 - 1.092,4 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sekitar 25 – 63 hari/tahun. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada bulan Februari – Agustus sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September – Januari.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2009, penduduk Kabupaten Bengkalis berjumlah 534.417 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Mandau (249.878 jiwa) sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Rupa Utara (13.337 jiwa). Dengan demikian kepadatan penduduk (perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya) rata-rata sebesar 68,7 jiwa/km². Tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah dengan presentase tidak memiliki ijazah sebesar 32,84%, SD sederajat 27,52%, SLTP sederajat 19,94%, SMU Sederajat 16,36%, Diploma 1,95%, S1 1,22% dan S2/S3/ 0,17%.

Gambaran umum kondisi Kabupaten Bengkalis di atas merupakan potensi sekaligus tantangan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis yang harus menjadi prioritas untuk diterjemahkan ke dalam program maupun kegiatan pemerintah daerah setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai titik awal penyusunan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kabupaten Bengkalis memiliki Visi Pembangunan Daerah untuk jangka panjang hingga tahun 2020, sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan pemerintah. Visi ini merupakan kristalisasi komitmen seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 Yakni :

“Menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan dukungan industri yang kuat dan sumberdaya manusia yang unggul, guna mewujudkan masyarakat sejahtera dan makmur tahun 2020”.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis tersebut dituangkan ke dalam Misi Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang juga menjadi agenda untuk dilaksanakan pada Tahun 2011, sebagai berikut :

1. Mengembangkan infrastruktur perkotaan dan pedesaan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam baik yang ada di daratan maupun di lautan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian dan kesinambungannya.
4. Mengembangkan daerah pantai, pesisir dan pulau-pulau secara terpadu untuk membuka isolasi daerah dan mengembangkan potensi sumber daya alamnya melalui pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai.
5. Menggali, memelihara, mengaktualisasi dan mengapresiasi nilai-nilai budaya Melayu guna terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

Sebagai komitmen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Kabupaten Bengkalis telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005 – 2025 (Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007) dan turunannya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun setiap periode kepemimpinan Kepala Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2011 masih merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2010 mengikuti kaidah transisi. Kaidah transisi yang dimaksud merupakan kerangka yang memediasi berakhirnya RPJMD 2005 – 2010 dan mengawali RPJMD 2010 – 2015. RKPD 2011 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan RPJMD 2010 – 2015 yang sedang dalam proses penyusunan. Sebagai Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan, dan ini merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kondisi umum dan permasalahan/isu strategis daerah Kabupaten Bengkalis yang sedang dihadapi.

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 merupakan pedoman bagi penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2011. yang disepakati dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Agar didapat rencana yang tanggap terhadap perubahan maka RKPD Tahun 2011 ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir pada tahun

2010 dan permasalahan serta tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2011.

1. 2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 merupakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025 ;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2010 ;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010.

1. 3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang meliputi Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan Indikasi pagu pendanaan yang akan digunakan pada Tahun Anggaran 2011. Proses penyusunannya dimulai pada Forum SKPD yang merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Kabupaten untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis, kemudian dilakukan penajaman kembali pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, yakni dengan memadukan prioritas program/kegiatan setiap SKPD dengan prioritas/kegiatan yang diusulkan dari kecamatan maupun dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, sesuai dengan kondisi dan permasalahan pokok yang sedang dihadapi di daerah maupun secara nasional.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan ;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah ;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat ; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1. 4. Sistematika Penyusunan RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2011 disusun sebagai Berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD
- 1.4 Sistematika Penyusunan RKPD

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

2.2 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010;
- 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian daerah tahun 2010 dan 2011;
- 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.4.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - 3.4.5 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI. PENUTUP

Lampiran-lampiran Pendanaan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Tahun 2011 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015 dengan mengikuti kaidah transisi dengan berakhirnya RPJMD 2005 – 2010 dan mengawali RPJMD 2010 – 2015. Berdasarkan perkembangan indikator makro, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis sejak otonomi daerah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 2009 sebesar 7,72 persen atau terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2008 sebesar 7,60 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku (tanpa migas) tahun 2009 sebesar Rp. 12.557.144,65 terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp. 15.169.339,29. penurunan ini merupakan perhitungan pasca terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bila dilihat per sektor ekonomi secara umum mengalami pertumbuhan positif, namun pertumbuhan antar sektor sampai tahun 2009 serta perkembangan harga yang terjadi pada masing-masing sektor belum banyak mempengaruhi pergeseran dalam struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis. Sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Tahun 2009 adalah sektor industri pengolahan dan pertanian serta perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2010 diharapkan akan dapat mencapai 7,66 persen, dan prediksi pendapatan perkapita tanpa migas sebesar Rp. 24.301.312,72 atau meningkat sebesar 17,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 20.731.284,80. persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 8,94 persen menjadi 7,45 persen pada tahun 2009, penurunan ini berbanding terbalik terhadap peningkatan pengangguran terbuka dari 11,77 persen pada tahun 2008 menjadi 12,18 persen pada tahun 2009 dan diperkirakan meningkat pada tahun 2010 menjadi 12,43 persen. Peningkatan ini dipicu oleh pemekaran wilayah yang mempengaruhi semua sektor yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga terlihat dari penurunan investasi (tanpa migas) dari Tahun 2008 sebesar 1.435.716,53 menjadi 1.160.130,10 pada tahun 2009.

Namun secara umum perkembangan pembangunan Kabupaten Bengkalis dari tahun ke tahun pada dasarnya telah menunjukkan kemajuan cukup baik, seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1. Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu

No	Indikator	Kondisi Tahun 2008	Target Tahun 2009	Kondisi yang di capai Tahun 2009
1.	Pertumbuhan PDRB	7,60	7,75	7,72
2.	Laju Inflasi	14,36	8,13	2,84
3.	PDRB Berlaku (tanpa migas)	15.169.339,29	12.013.212,34	12.557.144,65
4.	PDRB Konstan (tanpa migas)	4.197.232,96	3.016.597,28	3.210.499,78
5.	PDRB per Kapita	20.285.370,62	21.312.794,00	22.676.968,71
6.	Pendapatan per Kapita (tanpa	18.871.840,31	19.484.157,00	20.731.284,80
7.	migas)	747.797	542.143,66	553.740,00
8.	Jumlah Penduduk	8,94	8,50	7,48
9.	Persentase Penduduk Miskin	1,19	2,00	2,49
10.	Laju Pertumbuhan Penduduk			
	Angka Partisipasi Murni (APM)	95,92	96,55	97,42
	a. SD	77,06	75,21	63,78
	b. SMP	64,18	70,00	92,72
11.	c. SMU			
	Angka Partisipasi Kasar (APK)	117,14	116,42	112,90
	a. SD	85,79	81,84	71,69
	b. SMP	80,59	85,77	144,44
12.	c. SMU	97,78	97,90	97,39
13.	Angka Melek Huruf	70,13	71,27	70,25
14.	Angka Usia Harapan Hidup	11,77	11,56	12,18
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka	65,72	66,50	63,92
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja			

Sumber : Data di olah

2.2 Isu Strategis Kabupaten Bengkulu

Sampai dengan tahun kelima pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2005 – 2010 telah banyak kemajuan yang telah dicapai, hal ini didukung oleh 3 (tiga) faktor dominan, yaitu : tingkat penerimaan daerah yang relatif besar, posisi daerah yang sangat strategis yang berada pada jalur pelayaran Selat Malaka dan potensi sumber daya alam yang cukup tinggi. Namun demikian, Kabupaten Bengkulu masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Permasalahan yang dapat diidentifikasi menjadi permasalahan pokok/isu strategis yang perlu untuk diatasi, meliputi : terbatasnya infrastruktur akibat kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau, angka kemiskinan relatif

tinggi, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, masih perlunya percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta degradasi dan pencemaran lingkungan hidup.

Tahun 2011 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2010 – 2015 dengan tetap mengacu pada kaidah transisi RPJMD 2005 – 2010. Untuk itu, agenda pembangunan pada tahun 2011 tetap berkaitan dengan pelaksanaan program tahun 2010 dan mengacu pada empat pilar pembangunan Kabupaten Bengkalis, yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
4. Pendukung lainnya

Untuk mewujudkan agenda pembangunan yang telah digariskan di atas, maka strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok dan arah pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur.
2. Meningkatkan pembangunan, pengembangan serta penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.
3. Meningkatkan pembangunan, pengembangan serta penyediaan fasilitas perumahan dan pemukiman
4. Melanjutkan pembangunan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, jembatan dan perhubungan.
5. Melanjutkan program peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan.
6. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
7. Meningkatkan dan mengembangkan dan memelihara potensi pariwisata dan budaya.
8. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.
9. Meningkatkan kinerja penataan ruang, menata kawasan perkotaan, ruang terbuka hijau dan kawasan konservasi.
10. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

11. Meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan dan pulau terluar.
12. Meningkatkan kerjasama dan sinergi program pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tetangga serta *stakeholders*.
13. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah.
14. Mendata dan memelihara aset-aset Pemerintahan Daerah.
15. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal dan non formal serta penguasaan IPTEK.
16. Mengembangkan dan pembinaan pendidikan anak usia dini.
17. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
18. Meningkatkan ekonomi pedesaan dan ekonomi masyarakat.
19. Meningkatkan daya tarik investasi, ekspor non migas dan perdagangan.
20. Meningkatkan dan mendorong kemajuan sektor industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
21. Meningkatkan kualitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
22. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan SDM Aparatur.
23. Memperluas kesempatan kerja dan jaminan keselamatan kerja.
24. Mengembangkan potensi pesisir dan kelautan.
25. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sumber energi listrik masyarakat.
26. Memelihara dan mengendalikan keamanan dan stabilitas lingkungan.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 memberi gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2008, Tahun 2009, perkiraan Tahun 2010 dan sasaran pokok Tahun 2011, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran Tahun 2011 tersebut akan dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan. Dalam perencanaan ini akan dilihat beberapa indikator ekonomi makro yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bengkalis ke depan. Indikator tersebut antara lain PDRB atas dasar Harga Berlaku tanpa migas, Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, PDRB per Kapita dan Investasi.

Tabel. 2. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bengkalis

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	PDRB Harga Berlaku (Rp)	15.169.339,29	12.557.144,65	14.983.293,08	17.768.143,09
2	PDRB Harga Konstan (Rp)	4.197.232,96	3.210.499,78	3.456.321,51	3.728.275,73
3	Pertumbuhan Ekonomi	7,60	7,72	7,66	7,87
4	Tingkat Inflasi	14,38	2,82	5,67	7,14
5	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	4,66	4,58	4,40	4,23
6	Jumlah Penduduk Miskin	69.800	42.090	39.630	37.910
7	Tingkat Pengangguran (%)	11,77	12,18	12,43	12,02
8	Pendapatan Perkapita	18.871.840,31	20.731.284,80	24.301.312,72	28.310.806,08
9	IPM	74,12	74,64	75,06	75,57
10	Investasi (tanpa migas)	1.435.716,53	1.160.130,10	1.233.175,35	1.318.788,94

Sumber : Data di olah

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Stabilitas ekonomi digambarkan dengan indikator kunci (*key indicator*) perekonomian. Berdasarkan aspek pendapatan, perekonomian biasanya diukur dengan tolak ukur pendapatan perkapita. Kinerja perekonomian daerah dicerminkan dari pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi. Sedangkan indikator kunci perekonomian lainnya adalah

besaran angka inflasi, investasi, perbankan dan aspek ketenagakerjaan khususnya tingkat pengangguran.

Berbagai upaya untuk mendorong investasi dan sektor non-migas serta menumbuhkembangkan sektor riil guna meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Upaya ini telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2008 mencapai 7,60 persen (berdasarkan harga konstan Tahun 2000) dan pada Tahun 2009 mengalami sedikit peningkatan hingga mencapai rata-rata 7,72 persen, pertumbuhan ini masih diatas angka pertumbuhan Ekonomi Nasional yang pada Tahun 2008 sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 diharapkan akan dapat mencapai 7,66 s/d 7,87 persen. Sektor utama yang telah memberikan pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut adalah sektor industri pengolahan, sektor jasa serta sektor pengangkutan dan telekomunikasi.

3.1.2 PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Bengkalis

PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 (atas dasar harga berlaku) adalah sebesar Rp. 12.557.144,65,- Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp. 15.169.339,29,-. Turun sebesar Rp. 2.612.194,64,- ini disebabkan oleh Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti yang berakibat pada pengurangan wilayah geografis dan potensi ekonomi lainnya. Diprediksikan pada tahun 2010 PDRB Kabupaten Bengkalis akan naik menjadi Rp. 14.983.293,08,- atau sebesar 19,32 persen. Kontribusi sektor terbesar adalah sektor pertanian, sedangkan penyumbang terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini disebabkan karena sektor pertambangan tidak secara langsung dikuasai oleh daerah kecuali galian C.

PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita Tahun 2009 mengalami peningkatan. PDRB per kapita tahun 2008 atas harga berlaku adalah Rp. 20.285.370,62 menjadi Rp. 22.676.968,71 pada tahun 2009. Pendapatan per kapita Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 adalah Rp. 18.871.840,31 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2009 sebesar Rp. 1.859.444,49 menjadi Rp. 20.731.284,80.

Kondisi ini diperkirakan atas dasar bahwa pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tendensi semakin membaik, akibat adanya upaya pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam menurunkan

tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektifitas kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil pada Tahun 2009 dan Tahun 2010. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekspor non-migas dan mengurangi ekonomi biaya tinggi serta untuk mendongkrak kemampuan perekonomian masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2011 akan semakin membaik.

Untuk itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu disesuaikan dengan perkiraan asumsi ekonomi makro untuk APBN 2011 yaitu pertumbuhan ekonomi Tahun 2010 diperkirakan sebesar 5,5 persen atau lebih meningkat satu digit dari tahun 2009 yang hanya sebesar 4,5 persen, inflasi tahun 2010 diperkirakan sekitar 5 persen, naik dibandingkan tahun 2009 sebesar 2,78 persen. Peningkatan ini seiring dengan pemulihan ekonomi dunia dan domestik yang mendorong peningkatan harga komoditas dan tekanan inflasi mitra dagang yang berujung pada tekanan inflasi melalui perubahan harga barang yang diimpor. Angka pengangguran terbuka pada tahun 2011 diperkirakan sekitar 7,3 persen dan tingkat kemiskinan berkisar 11,5 – 12,5 persen dari angkatan kerja.

3.1.3 Investasi Kabupaten Bengkalis

Nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Bengkalis selama periode Tahun 2000 – 2009 atas dasar harga konstan Tahun 2000 dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Nilai investasi yang ditanam pada awal Tahun 2000 sebesar Rp. 906,40 milyar menjadi sebesar Rp. 1.435,72 milyar pada Tahun 2008 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2009 menjadi Rp. 1.160,13 milyar. Dan diperkirakan pada tahun 2010 akan meningkat menjadi Rp.1.233,17 milyar

Untuk menentukan besarnya penyediaan dana atau investasi yang diperlukan pada tahun 2011 sangat tergantung pada laju pertumbuhan yang direncanakan, perkiraan PDRB atas dasar harga berlaku dan besarnya *Incremental Capital Out Put Ratio (ICOR)*. Perkiraan jumlah investasi berasumsi bahwa PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2011 sebesar Rp. 17.768.143,09, dengan jumlah investasi Rp. 1.318,79 milyar dan angka ICOR 4,23 persen.

Sementara itu, besarnya porsi investasi dibandingkan dengan besarnya PDRB setiap tahunnya berkisar antara 35 % sampai 40%. Porsi investasi yang cukup besar merupakan efek dari besarnya porsi

pembangunan infrastruktur dan sarana fisik sejak diberlakukannya otonomi daerah.

3.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis

Secara Nasional krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 2008 mempengaruhi kondisi mutu pembangunan manusia di seluruh Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2008 berada pada posisi 74,12 dan 74,64 pada tahun 2009. diperkirakan IPM Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 ini berkisar pada angka 75,06 dan target pada tahun 2011 menjadi 75,57. Adapun pencapaian untuk ketiga indikator pembentuk IPM Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkalis Tahun 2006 - 2009

No	Komponen IPM	Tahun				Kenaikan 2006 - 2009
		2006	2007	2008	2009	
1	IPM	73,10	73,36	74,12	74,64	2,10
2	Indeks Harapan Hidup					
	◆ Angka Harapan Hidup (thn)	69,90	70,06	70,13	70,25	0,49
3	Indeks Pendidikan					
	◆ Angka Melek Huruf (%)	97,29	97,29	97,78	97,39	0,10
	◆ Rata-rata Lama Sekolah. MYS (thn)	8,60	8,60	8,86	8,99	4,58
4	Indeks Pendapatan					
	◆ Pendapatan per kapita (Rp)	621.740	623.990	629.490	633.400	1,88

Sumber : Data di olah

3.1.5 Koefisien ICOR

Pada periode Tahun 2001 – 2007 nilai ICOR Kabupaten Bengkalis tanpa migas rata-rata sebesar 5,38. Artinya bahwa untuk meningkatkan satu unit output dibutuhkan modal sebesar 5,38 unit. Dari sini bisa dikatakan bahwa investasi pada periode ini nilai efisiensinya dalam menghasilkan tambahan output relatif sedang dan belum sampai pada level efisien. Tetapi memasuki tahun 2008 terlihat angka ICOR yang semakin kecil 4,66 dan pada tahun 2009 semakin kecil lagi yakni 4,58. hal ini menjadi indikasi bahwa penggunaan investasi mulai mengarah kepada efisien.

3.1.6 Penduduk dan Kemiskinan

Pada tahun 2008 penduduk Kabupaten Bengkalis (sebelum pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti) berjumlah 747.797 jiwa atau naik $\pm 1,19\%$ dari Tahun 2007, yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 385.485 jiwa dan jenis kelamin perempuan 362.312 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Mandau (256.108 jiwa) sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Rupa Utara (13.342 jiwa). Dengan demikian kepadatan penduduk (perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya) rata-rata sebesar 65,13 jiwa/km².

Penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2009 (Pasca Pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti) sebesar 553.740 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 2,49 persen sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun 2008 sebesar 2,00 persen. Kepadatan penduduk Kabupaten Bengkalis meningkat dari 64,36 jiwa per km² tahun 2007 menjadi 65,13 jiwa per km² tahun 2008, dan pada tahun 2009 menjadi 48,23 jiwa/km². terjadi penurunan yang jauh sebagai akibat dari pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bila dilihat kepadatan penduduk per kecamatan. Kecamatan Mandau memiliki kepadatan tertinggi dengan jumlah 273,19 jiwa per km², kemudian Kecamatan Bengkalis dengan 141,95 jiwa per km² dan kepadatan terendah pada Kecamatan Rupa Utara dengan 21,23 jiwa per km².

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009 berjumlah 42.090 jiwa yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun 2008 sebesar 69.800 jiwa. Penduduk miskin pada umumnya masih terkonsentrasi di daerah pedesaan, hal ini disebabkan masih lemahnya kelembagaan ekonomi pedesaan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian dan industri sebagai penggerak perekonomian pedesaan.

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011

Kebijakan ekonomi makro akan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal daerah Kabupaten Bengkalis, sasaran ekonomi makro Tahun 2010 dan Tahun 2011 adalah terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi Kabupaten Bengkalis. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, akan berakibat kepada turunnya angka pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis.

Lingkungan eksternal yang menjadi perhatian utama saat ini adalah adanya resesi ekonomi global yang masih dalam proses pemulihan dan pemberlakuan perdagangan bebas Asean China Free Trade Area (ACFTA) yang mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah dan berimplikasi positif maupun negatif. Faktor internal yang akan mempengaruhi ekonomi makro Kabupaten Bengkalis di Tahun 2010 dan Tahun 2011 nanti antara lain stabilitas keamanan daerah dan stabilitas politik daerah. Tahun 2011 merupakan tahun pertama efektifnya pelaksanaan tugas bagi Bupati baru yang terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2010. Artinya besar kemungkinan akan terjadinya pergeseran paradigma dalam konsep dan strategi pembangunan daerah sebagai akibat dari komitmen visi misi yang telah disampaikan saat kampanye dan harus dilaksanakan.

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada Tahun 2008 dan perkiraan Tahun 2009, maka prediksi tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Bengkalis yang akan dihadapi pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 adalah sebagai berikut.

3.2.1 Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Bengkalis terletak di pesisir timur Sumatera yang terdiri dari daerah berupa pulau-pulau dan daratan. Kabupaten Bengkalis juga memiliki sumberdaya alam beragam yang secara ekonomis bernilai tinggi, baik sumberdaya mineral maupun non-mineral, akan tetapi pemanfaatan sumberdaya alam yang dimilikinya selama ini belum berdampak nyata kepada kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis, dimana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009 sebesar 7,48 persen menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 8,94 persen. Tapi penurunan ini tidak signifikan dibandingkan penurunan jumlah penduduk sebagai akibat dari pemekaran wilayah dimana pada tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis sebesar 747.797 jiwa dan menurun drastis pada tahun 2009 menjadi 553.740 jiwa.

Permasalahan yang juga masih harus dihadapi adalah kapasitas produksi dan akses terhadap sumberdaya produktif bagi masyarakat miskin masih jauh di bawah tingkat yang memungkinkan untuk berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari sisi peningkatan kualitas manusia, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sanitasi belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya yang berada di daerah pesisir secara optimal. Hal ini

disebabkan karena kesulitannya menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh, keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, maupun karena ketidakmampuan masyarakat tersebut secara ekonomi.

Untuk itu pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis akan terus dikurangi antara 7 – 8 persen dengan membuat program-program pengurangan kemiskinan, dengan membagi terhadap tiga program pokok yaitu pertama berupa program-program yang memberikan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin kepada kebutuhan dasar, kedua merupakan program-program tentang pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan ketiga adalah program-program perkuatan usaha mikro dan kecil.

3.2.2 Peningkatan Investasi

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari peranan dunia usaha yang ada, baik dalam skala yang kecil maupun besar. Tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten Bengkalis sejak bergulirnya era otonomi daerah adalah bagaimana usaha pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tidak hanya dalam segi pembangunan infrastruktur maupun dari segi peningkatan sumberdaya manusia, juga dalam penyediaan lapangan usaha dan pekerjaan. Kondisi perekonomian pada tahun 2011 diperkirakan sudah akan membaik karena dampak resesi global sudah mereda. Namun demikian upaya peningkatan daya tarik investasi khususnya di Kabupaten Bengkalis masih mengalami masalah antara lain dari keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur, ketersediaan energi dan air bersih serta belum optimalnya harmonisasi, sinkronisasi berbaqai perangkat peraturan dan prosedur perizinan investasi.

Mencermati perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011 akan mencoba untuk mendorong perkembangan investasi agar lebih terdiversifikasi kelompok usahanya, memenuhi ketersediaan infrastruktur, energi dan air bersih serta mengoptimalkan harmonisasi, sinkronisasi berbaqai perangkat peraturan dan prosedur perizinan investasi.

3.2.3 Pengembangan Industri

Tantangan dibidang industri di Kabupaten Bengkalis sangat dipengaruhi oleh permasalahan yang ada dalam sektor itu sendiri (masalah

internal) dan permasalahan yang berada diluar sektor industri (masalah eksternal). Permasalahan internal utamanya bersumber pada lemahnya bentuk usaha dan jumlah populasi usaha industri, lemahnya struktur industri, serta rendahnya produktivitas. Sedangkan masalah eksternal industri mencakup ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang belum memadai, masih lemahnya pengamanan dan pengawasan limpahan produk-produk luar negeri yang masuk baik secara legal maupun ilegal di pasar domestik.

Untuk itu pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada bidang industri melakukan revitalisasi industri dengan menciptakan iklim dan fasilitasi bagi Industri agar mampu bersaing dengan industri daerah lainnya terutama pada industri kecil dan menengah. Selain itu tantangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis cukup besar yaitu mengamankan pasar domestik dari limpahan produk-produk luar negeri yang masuk baik secara legal maupun ilegal

3.2.4 Produktivitas Tenaga Kerja

Dari segi tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis masih terfokuskan pada daerah perkotaan khususnya pada kota Duri dan Bengkalis. Para pencari kerja pada umumnya didominasi dari tenaga kerja dari luar daerah, dimana dari segi produktivitas dan keahlian tenaga luar jauh lebih produktif dan ahli dari pada tenaga kerja tempatan dan ini semua akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan serta daya saing daerah tersebut. Sementara itu di lihat dari indikator lain, yakni tingkat pengangguran terbuka, meski menurun dari tahun ke tahun, tetapi pada tahun 2009 nilainya masih cukup tinggi yaitu 12,18 persen, masih lebih tinggi dari nilai nasional yaitu sebesar 8,39 persen.

Setidaknya ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah bahwa Kabupaten Bengkalis masih dihadapkan pada rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan pembudidayaan ikan, rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan tingkat kemiskinan di wilayah pesisir, kurangnya permodalan, kurangnya desiminasi teknologi pengolahan produk perikanan dan masih rendahnya sarana dan prasarana penunjang perikanan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun ke depan tetap memfokuskan kepada peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan pendidikan nelayan dan pemberian modal.

3.2.5 Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

Untuk pembangunan pada bidang pertanian pada Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih dihadapkan pada masalah tingginya tingkat konversi lahan pertanian, sehingga akan mengakibatkan terancamnya tingkat produksi hasil pertanian. Pada bidang peternakan dan perkebunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2011 akan tetap pada peningkatan dan pengembangan sentra-sentra produksi peternakan, pertanian dan perkebunan yang telah ada, mengoptimalkan pengembangan dan diseminasi teknologi kepada masyarakat, sehingga pembangunan di bidang peternakan, pertanian dan perkebunan akan dapat menunjang pembangunan bidang-bidang lainnya. Sedangkan pembangunan pada bidang kehutanan pada Tahun 2011 masih dihadapkan pada masih banyaknya HTI dan HTR yang masih tumpang tindih dalam pengelolaannya, sehingga permasalahan sengketa lahan masih sering terjadi. Pada Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melakukan upaya pendataan pengelolaan HTI dan HTR yang ada dalam penentuan batas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Bengkalis, sehingga konflik batas wilayah pengelolaan tidak lagi terjadi.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.3.1 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu parameter keberhasilan pembangunan daerah adalah terciptanya keadaan ekonomi yang kondusif dan stabil. Stabilitas ekonomi yang baik sangat diperlukan bagi keberlangsungan pembangunan. Daerah dengan keadaan ekonomi yang maju relatif akan lebih berhasil dalam mendukung terciptanya berbagai kemajuan lainnya. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa dengan ekonomi yang maju akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor produksi (sektor riil), kebijakan moneter serta situasi dan kondisi umum. Disamping itu juga perkembangan krisis ekonomi global juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan PDRB (harga konstan) pada Tahun 2010 diperkirakan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis sebesar 7,66 persen, di mana

kontribusi terbesar diperkirakan berasal dari sektor keuangan, jasa-jasa dan bangunan.

3.3.2 Perkiraan PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita

PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku dengan menggunakan asumsi laju pertumbuhan PDRB per kapita Tahun 2006 – 2009 adalah sebesar 16,89 persen, maka pada tahun 2010 PDRB per kapita Kabupaten Bengkalis diperkirakan sebesar Rp. 14.983.293,08 dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 17.768.143,09. Pendapatan per kapita Kabupaten Bengkalis diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 diperkirakan sekitar Rp. 24.301.312,72 dan tahun 2011 mencapai Rp. 28.310.806,08 atau meningkat 16,5 persen.

Diperkirakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB tahun 2010 adalah sektor industri pengolahan dan pertanian serta perdagangan. Kondisi ini diperkirakan atas dasar bahwa pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tendensi semakin membaik, akibat adanya upaya Pemerintah Pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan cara meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektifitas kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekspor non migas dan mengurangi ekonomi biaya tinggi.

3.3.3 Perkiraan Pertumbuhan Penduduk dan Kemiskinan

Perkembangan penduduk di Kabupaten Bengkalis termasuk relatif tinggi, yaitu sebesar 4,65 % di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau sebesar 3,73 %. Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh karena relatif tingginya dinamika pembangunan di daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang kaya dan letaknya sangat strategis. Maka pada Tahun 2011 di prediksi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis berkisar pada angka 7,7 – 7,87 persen.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2011 lebih diarahkan kepada pengembangan, peningkatan dan

pencapaian target pendapatan asli daerah dengan melakukan beberapa program baru dalam mencari sumber baru pendapatan asli daerah dengan tidak membebani masyarakat. Rencana program tersebut antara lain :

- Perencanaan dan penentuan target Pendapatan Asli Daerah didasarkan potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana dan SDM aparatur pengelola. Tidak semata-mata didasarkan dari capaian tahun sebelumnya.
- Pemungutan Retribusi Daerah yang potensial perlu dilakukan kerjasama dengan pihak swasta secara selektif dan melalui pengkajian mendalam.
- Pengembangan sistem *self-assesment* bagi wajib pajak daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan.
- Penerapan sanksi dan penghargaan secara tegas, adil dan proporsional kepada semua wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- Peningkatan pelayanan melalui penyederhanaan sistem, prosedur dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi laba perusahaan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terutama melalui pemanfaatan aset daerah dan pengelolaan jasa giro termasuk rabat.

Diproyeksikan bahwa pendapatan dan penerimaan daerah Tahun 2011 sebesar Rp. 1.721.076.500.000,00 terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah Rp. 96.713.500.000,00
- Dana Perimbangan Rp. 1.624.335.000.000,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 30.000.000.000,00

Tabel. 4. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 s/d 2011

No	Pendapatan Daerah	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1.1	Pendapatan Asli Daerah	121.844.889.934,07	136.345.456.553,81	94.258.500.000,00	96.713.500.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	24.248.996.392,12	23.835.645.587,37	14.131.500.000,00	15.051.500.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	13.583.336.547,01	13.652.301.203,27	6.127.000.000,00	6.662.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan	4.089.640.225,00	7.161.411.877,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00

	yang dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	79.922.912.769,94	93.696.097.886,17	68.000.000.000,00	69.000.000.000,00
1.2	Dana Perimbangan	2.499.123.277.122,00	1.528.941.031.023,00	1.978.789.300.000,00	1.624.335.000.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	285.446.421.716,00	278.352.809.040,00	240.100.000.000,00	221.100.000.000,00
1.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.141.202.603.164,00	1.224.542.221.963,00	1.725.135.000.000,00	1.403.235.000.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Umum	51.680.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	20.793.502.242,00	26.046.000.000,00	13.554.300.000,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	36.053.726.258,06	54.256.282.077,33	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya	36.053.726.258,06	54.256.282.077,33	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		2.657.021.893.314,13	1.721.542.769.654,14	2.103.047.800.000,00	1.721.076.500.000,00

3.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2011 lebih ditekankan kepada meminimalisir kegiatan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Sehingga sisa dana kegiatan tersebut tidak terlampaui banyak yang tidak terpakai. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan dana lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan dana penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan yang tidak terselesaikan

sampai dengan akhir tahun anggaran. SiLPA diupayakan maksimum 5 % dari APBD tahun sebelumnya.

Pada APBD tahun 2011 diproyeksikan bahwa pembiayaan daerah sebesar Rp. 524.545.263.398,30 atau mengalami penurunan sebesar 10,6 persen dibanding pembiayaan tahun 2010 sebesar Rp. 586.843.791.254,83, yang terdiri atas :

- Penerimaan pembiayaan daerah yang sah merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2010 sebesar Rp. 524.545.263.398,30

Tabel 5. Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 s/d 2011

No	Penerimaan Daerah	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	1.813.700.749.289,88	1.818.722.961.514,66	586.843.791.254,83	524.545.263.398,30
JUMLAH		1.813.700.749.289,88	1.818.722.961.514,66	586.843.791.254,83	524.545.263.398,30

3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Adapun arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap belanja daerah adalah :

- Mengutamakan belanja yang bersifat wajib (*fix cost*) baru kemudian belanja lainnya pada setiap perencanaan belanja.
- Hemat, tidak mewah, efisien sesuai kebutuhan yang disyaratkan.
- Terarah, terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dana yang tersedia.
- Wajib menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun pihak lainnya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan, baik kegiatan yang pelaksanaannya hanya 1 (satu) tahun anggaran maupun kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (*multiyears*).
- Selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang.
- Kegiatan-kegiatan skala Desa / Kelurahan maupun kegiatan skala Dusun / Lingkungan akan dibiayai melalui Dana Alokasi Desa dan

Dana Alokasi Kelurahan yang dialokasikan melalui APBD setiap tahun, kecuali kegiatan rehabilitasi akibat bencana alam/sosial.

- Pengalokasian belanja kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan prasarana fisik harus memperhatikan aspek pemerataan, keseimbangan antar wilayah dan keterpaduan dengan program/kegiatan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang tengah dilaksanakan.

Asumsi belanja pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.706.682.909.820,66 yang akan dipergunakan untuk belanja program dan kegiatan serta pembiayaan yang di nilai strategis, komponen belanja meliputi :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 1.038.401.469.713,34
- Belanja Langsung Rp. 1.668.281.440.107,32

Belanja langsung tersebut merupakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan strategis di bidang pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Peningkatan SDM, Infrastruktur dan Program Pendukung Lainnya. Disamping untuk mendanai program dan kegiatan strategis sebagaimana tersebut di atas, alokasi penerimaan pendapatan juga dipergunakan untuk penyertaan modal dan pembayaran utang daerah dalam bentuk pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel. 6. Realisasi dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 s/d 2011

No	Belanja Tidak Langsung	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	2	3	4	5	6
1.1	Belanja Pegawai	448.012.289.121,0 0	613.859.221.086,0 0	585.654.823.598,3 8	600.296.194.188,3 4
1.2	Belanja Bunga	0,00	1.046.677.984,53	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	6.738.064.736,00	8.200.000.000,00	6.834.180.000,00	7.005.034.500,00
1.4	Belanja Hibah	3.250.000.000,00	86.243.898.800,00	95.350.000.000,00	97.733.750.000,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	346.939.872.500	333.907.655.000,0 0	218.395.601.000,0 0	223.855.491.025,0 0
1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	67.000.000.000,00	120.720.000.000,0 0	106.840.000.000,0 0	109.511.000.000,0 0
1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	1.066.564.399,44	1.093.228.509,43
	JUMLAH	871.940.226.384,0 0	1.163.977.452.870, 53	1.014.141.168.997, 82	1.038.401.469.713, 34

3.4.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2011 diupayakan untuk :

- Pembayaran utang kepada pihak ketiga, khususnya terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan namun pembayarannya belum dilakukan.
- Melakukan pembayaran utang pokok seperti pinjaman kepada ADB dan lembaga keuangan lainnya yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Bengkalis (jika ada).
- Memberikan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.
- Pembentukan dana cadangan, sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- Dan lain-lain pengeluaran pembiayaan yang dianggap perlu sepanjang pengeluaran tersebut akan berdampak menambah asset daerah.

Tabel. 7. Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 s/d 2011

No	Pengeluaran Daerah	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	2	3	4	5	6
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan modal (investasi daerah)	65.906.480.267,0 0	58.452.912.800,0 0	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran pokok hutang	0,00	421.640.000,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pembayaran Utang Kpd Pihak Ketiga	0,00	38.353.199.625,0 0	48.158.773.371,8 2	0,00
JUMLAH		65.906.480.267,0 0	97.227.752.425,0 0	48.158.773.371,8 2	0,00

3.4.5 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 s/d 2011

Adapun rekapitulasi dan proyeksi kerangka pendanaan pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 8. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 s/d 2011

No	Jenis Pendapatan	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	121.844.889.934,07	136.345.456.553,81	94.258.500.000,00	96.713.500.000,00
1.1	Pajak Daerah	24.248.996.392,12	23.835.645.587,37	14.131.500.000,00	15.051.500.000,00
1.2	Retribusi Daerah	13.583.336.547,01	13.652.301.203,27	6.127.000.000,00	6.662.000.000,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yg dipisahkan	4.089.640.225,00	7.161.411.877,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	79.922.912.769,94	93.696.097.886,17	68.000.000.000,00	69.000.000.000,00
1.2	Dana Perimbangan	2.499.123.277.122,00	1.528.941.031.023,00	1.978.789.300.000,00	1.624.335.000.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	285.446.421.716,00	278.352.809.040,00	240.100.000.000,00	221.100.000.000,00
1.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.141.202.603.164,00	1.224.542.221.963,00	1.725.135.000.000,00	1.403.235.000.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Umum	51.680.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	20.793.502.242,00	26.046.000.000,00	13.554.300.000,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	36.053.726.258,06	54.256.282.077,33	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya	36.053.726.258,06	54.256.282.077,33	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonom Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.657.021.893.314,13	1.721.542.769.654,14	2.103.047.800.000,00	1.721.076.500.000,00
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai	448.012.289.121,00	613.859.221.086,00	585.654.823.598,38	600.296.194.188,34
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	1.046.677.984,53	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	6.738.064.736,00	8.200.000.000,00	6.834.180.000,00	7.005.034.500,00
2.1.4	Belanja Hibah	3.250.000.000,00	86.243.898.800,00	95.350.000.000,00	97.733.750.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	346.939.872.500	333.907.655.000,00	218.395.601.000,00	223.855.491.025,00
2.1.6	Belanja bagi hasil	-	-	-	0

	kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	67.000.000.000,00	120.720.000.000,00	106.840.000.000,00	109.511.000.000,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	-	-	1.066.564.399,44	1.093.228.509,43
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	871.940.226.384,00	1.163.977.452.870,53	1.014.141.168.997,82	1.038.401.469.713,34
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai	189.929.930.438,92	144.494.065.450,00	137.443.359.550,00	140.879.443.538,75
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	436.770.055.115,16	464.788.633.490,50	458.317.030.707,06	469.774.956.474,74
2.2.3	Belanja Modal	1.084.282.102.740,10	1.028.118.450.601,00	1.031.831.258.628,13	1.057.627.040.093,83
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.710.982.088.294,18	1.637.401.149.541,50	1.627.591.648.885,19	1.668.281.440.107,32
	TOTAL JUMLAH BELANJA (B + C)	2.582.922.314.678,18	2.801.378.602.412,03	2.641.732.817.883,01	2.706.682.909.820,66
	SURPLUS/(DEFISIT)	74.099.578.635,95	(1.079.735.832.757,89)	(538.685.017.883,01)	(985.606.409.820,66)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Daerah				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	1.813.700.749.289,88	1.818.722.961.514,66	586.843.791.254,83	524.545.263.398,30
3.1.2	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.813.700.749.289,88	1.818.722.961.514,66	586.843.791.254,83	524.545.263.398,30
3.2	Pengeluaran Daerah				
3.2.1	Pembentukan dan cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan modal (investasi daerah)	65.906.480.267,00	58.452.912.800,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	421.640.000,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00

	daerah				
3.2.5	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	38.353.199.625,00	48.158.773.371,82	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	65.906.480.267,00	97.227.752.425,00	48.158.773.371,82	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	1.747.794.269.022,88	1.721.495.209.089,66	538.685.017.883,01	524.545.263.398,30
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.818.722.961.514,66	586.843.791.254,83	-	-

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

Berdasarkan isu strategis yang menjadi permasalahan pokok dan fokus utama untuk dapat ditangani melalui pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis maka kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

4.1. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur

4.1.1. Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan

Karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan telah memberikan pemahaman terhadap perlunya mewujudkan aksesibilitas wilayah yang semakin baik. Sehingga secara umum infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas sangat perlu ditingkatkan secara terus menerus guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong aktifitas perekonomian serta pertumbuhan daerah. Salah satu yang perlu dilakukan percepatan dalam pengembangannya di Kabupaten Bengkalis adalah sarana dan prasarana transportasi, baik moda transportasi darat, laut maupun udara. Demikian pula halnya dengan faktor keterpaduan moda transportasi serta upaya untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, semakin aman dan nyaman.

Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Bengkalis masih perlu dilakukan percepatan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan wilayah dan optimalisasi hasil-hasil pembangunan. Kondisi wilayah Kabupaten Bengkalis yang spesifik memerlukan penanganan prasarana jalan dan jembatan yang lebih optimal. Pembangunan prasarana jalan dan jembatan terutama jalan poros penghubung antar kecamatan dan desa merupakan fokus penting yang perlu dipacu percepatan pembangunan maupun peningkatannya. Hal ini mengingat masih terdapat beberapa ruas jalan dimaksud yang belum dapat berfungsi secara optimal baik di wilayah Kabupaten Bengkalis yang berada di daratan pulau Sumatera maupun di pulau-pulau di pesisir.

Mengingat pentingnya prasarana jalan dan jembatan dalam meningkatkan pertumbuhan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis, maka secara berkelanjutan dan menyeluruh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan kebijakan dengan memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan, pada ruas-ruas jalan antara lain :

- Jalan poros Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Jalan lingkungan perkotaan dan perdesaan.
- Ruas jalan utama pada ibu kota kecamatan.
- Ruas jalan penghubung sentra produksi, pusat pelayanan kesehatan, perkantoran pemerintah dan swasta, tempat ibadah, pelabuhan, sentra perdagangan, daerah tujuan wisata serta fasilitas umum lainnya.
- Ruas jalan provinsi dan jalan nasional melalui program sharing.

Disamping itu upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah melalui peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Bengkalis juga diaplikasikan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan maupun rencana pembangunan jalan dan jembatan.

4.1.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kabupaten Bengkalis secara geografis merupakan daerah yang terdiri dari wilayah daratan dan pulau-pulau. Sehingga fasilitas transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang seluruh aktifitas masyarakat, memacu mobilitas orang dan barang, menggerakkan roda perekonomian serta optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Dengan wilayah yang terdiri dari 8 kecamatan dengan luas wilayah mencapai 7.773,93 km², maka kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Bengkalis merupakan suatu hal yang mutlak. Demikian juga dengan upaya untuk tetap mempertahankan kondisi dan fungsi sarana dan prasarana tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna transportasi dan juga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah Kabupaten Bengkalis.

Keterpaduan antar moda transportasi yang satu dengan moda transportasi lainnya sangat diperlukan dalam upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi di Kabupaten Bengkalis. Guna mewujudkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan tetap

melaksanakan sejumlah upaya dan kebijakan pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana perhubungan. Kebijakan tersebut akan diimplementasikan melalui kegiatan antara lain :

- Peningkatan fasilitas dan operasional pelabuhan Bandar Sri Laksamana, Bandar Sri Setia Raja dan pelabuhan penumpang lainnya.
- Peningkatan fasilitas dan operasional pelabuhan penyeberangan (ro-ro) Air Putih – Sungai Selari dan Tanjung Kapal – Dumai.
- Peningkatan fasilitas dan operasional pelabuhan barang/kargo.
- Peningkatan fasilitas dan operasional terminal AKAP, AKDP, terminal angkot serta terminal angkutan perdesaan.
- Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi pelabuhan rakyat / steiger.
- Pengadaan dan pemasangan kelengkapan, rambu-rambu lalu lintas di darat, perairan dan laut.
- Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dalam upaya mewujudkan tatanan transportasi yang lebih baik di Kabupaten Bengkalis.

4.1.3. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman

Sebagaimana halnya dengan sarana dan prasarana perhubungan, maka peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman juga merupakan faktor penting yang harus diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Lingkungan permukiman baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan perlu ditata dan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang semakin baik. Hal ini guna lebih menjamin terwujudnya lingkungan permukiman yang baik, sehat dalam mendukung aktifitas warga yang berada di lingkungan tersebut, juga sebagai wujud pelayanan publik yang memang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah tidak terbatas hanya pada kegiatan pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan secara fisik dari fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang dibutuhkan. Tetapi juga memberikan fasilitasi terhadap upaya penyediaan dan peningkatan fasilitas tersebut di kawasan permukiman.

Demikian pentingnya sarana dan prasarana permukiman dalam meningkatkan pertumbuhan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Bengkalis, maka secara berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan kebijakan dengan memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana permukiman antara lain melalui :

- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan lingkungan, sistem dan jaringan drainase serta saluran air limbah.
- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan permukiman seperti fasilitas peribadatan, olahraga, pendidikan, rekreasi, telekomunikasi, perekonomian dan sebagainya
- Penataan lingkungan permukiman.
- Fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah melalui peningkatan sarana dan prasarana permukiman di Kabupaten Bengkalis juga diaplikasikan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan maupun rencana pembangunan fasilitas permukiman. Bukan hanya terbatas pada upaya penyediaan dan peningkatan dari fasilitas umum serta fasilitas sosial saja, tetapi juga dengan memelihara dan menjamin optimalisasi fungsi dari sarana dan prasarana tersebut secara berkelanjutan.

4.1.4. Pengembangan Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, karena di wilayah tersebut akan tumbuh dan berkembang interaksi antar masyarakat dari kedua negara bertetangga. Adanya interaksi tersebut baik yang berlangsung secara tradisional maupun pola hubungan yang lebih modern dapat berdampak positif maupun negatif dalam perkembangan selanjutnya.

Secara umum pulau - pulau dalam wilayah Kabupaten Bengkalis yang berada di perairan Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Dalam hal ini masyarakat di Kabupaten Bengkalis khususnya yang bertempat tinggal di pesisir sudah sejak lama menjalin hubungan dengan negara tetangga (Malaysia dan Singapura) melalui aktifitas perdagangan maupun hubungan kekerabatan. Hubungan tersebut tetap berlangsung sampai dengan saat ini dengan intensitas yang semakin meningkat. Kondisi ini terjadi mengingat akses ke negara tetangga tersebut (Malaysia) lebih mudah jika dibandingkan dengan hubungan ke ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru) maupun ibukota negara.

Masih terbatasnya aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur sosial ekonomi maupun telekomunikasi merupakan salah satu faktor yang mendorong orientasi masyarakat diperbatasan menjadi lebih banyak ke negara tetangga. Kondisi tersebut dikhawatirkan berpotensi menyebabkan semakin berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat khususnya yang berada dikawasan perbatasan. Posisi Kabupaten Bengkalis yang berada di kawasan perbatasan tersebut memberikan implikasi terhadap munculnya sejumlah permasalahan dan isu strategis yang menuntut penanganan dan pengelolaan yang lebih serius dan komprehensif serta melibatkan banyak pihak terkait.

Pengembangan kawasan perbatasan merupakan upaya yang harus dilakukan secara terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta *stakeholders* terkait. Oleh karena itu program/kegiatan tahun 2011 yang perlu mendapatkan dukungan semua pihak terkait sebagai pemangku kepentingan antara lain :

- Peningkatan infrastruktur di daerah perbatasan, seperti sarana dan prasarana perhubungan darat dan perhubungan laut.
- Peningkatan fasilitas ekonomi.
- Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan lainnya.
- Peningkatan sarana air bersih.
- Penyediaan tenaga listrik.
- Peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi (jaringan televisi, radio dan lainnya).
- Peningkatan fasilitas dan penanganan terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan.

4.2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Cerdas dan Berkualitas

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka membangun, meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

4.2.1. Pembangunan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkalis harus mampu menjamin pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan dan

pengembangan pendidikan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis selama ini masih belum merata pada setiap daerah, hal ini dapat dilihat terutama pada pendistribusian guru. Di pedesaan, jumlah peserta didik relatif banyak dibandingkan dengan perkotaan, tetapi jumlah guru justru lebih banyak di perkotaan. Kondisi seperti ini mengakibatkan tingkat pengetahuan peserta didik juga tidak merata meskipun kurikulum yang digunakan sama.

Agar pembangunan di Bidang Pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabuapten Bengkalis, untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyusun priorotas-prioritas pembangunan dalam Bidang Pendidikan, antara lain :

- a. Penuntasan program wajib belajar sembilan tahun
- b. Menyelenggarakan wajib belajar 12 untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, yang bermutu.
- c. Meningkatkan mutu pendidikan
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan lainnya, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan potensinya dalam tugas pembelajaran.
- e. Meningkatkan dan menyediakan dana pendidikan yang memadai.
- f. Memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan siswa yang orang tuanya kurang mampu serta anak-anak guru di daerah terpencil yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Selain itu, beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Bimbingan Tekhnis atau pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dibidang perencanaan pembangunan daerah, keuangan, pengadaan barang/jasa pemerintah dan lain-lain.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajabatan untuk pegawai golongan II dan III.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat IV dan III.
- d. Mengirimkan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat II.

4.2.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Bengkalis masih perlu terus ditingkatkan, dimana kesehatan merupakan suatu investasi dan modal dasar dalam pembangunan. Pembangunan kesehatan selain berperan dalam membangun manusia sebagai insan yang sehat, juga berperan penting dalam membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan.

Perkembangan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang positif. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan pembangunan Puskesmas dan Pustu yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sampai ke desa-desa.

Tujuan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bengkalis adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui hidup dengan menerapkan perilaku sehat dalam lingkungan yang sehat dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyusun prioritas pembangunan di bidang Kesehatan, antara lain :

- a. Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas puskesmas pembantu serta puskesmas rawat inap
- b. Pemerataan penyebaran tenaga medis/ paramedis baik itu perawat, bidan dan dokter
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
- f. Meningkatkan ketersediaan obat perbekalan kesehatan
- g. Mengintensifkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan gizi keluarga
- h. Meningkatkan pelayanan kesehatan gratis masyarakat kurang mampu
- i. Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak.
- j. Meningkatkan keluarga peserta KB aktif untuk menciptakan keluarga sejahtera.

4.2.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penyebaran penduduk di Kabupaten Bengkalis pada umumnya terkonsentrasi pada daerah perkotaan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata, penyebaran yang tidak merata tersebut diakibatkan oleh kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari wilayah kepulauan. Daerah yang perkembangannya cukup pesat di Kabupaten Bengkalis terpusat pada daerah – daerah yang mempunyai penduduk yang banyak seperti pada Kecamatan Bengkalis, Mandau dan Pinggir, sehingga penyebaran tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis juga terpusat pada ketiga daerah tersebut diatas.

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 berjumlah 498.338 orang yang terdiri dari laki-laki 260.644 orang dan perempuan berjumlah 237.694 orang. Untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis telah dibangun dua Balai Latihan Kerja (BLK) yaitu Kecamatan Bengkalis dan Mandau.

Agar pembangunan dibidang kependudukan dan ketenagakerjaan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyusun prioritas – prioritas pembangunan, antara lain :

- a. Peningkatan kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.
- b. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
- c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
- e. Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja
- f. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
- g. Penciptaan lapangan kerja penduduk lokal
- h. Peningkatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)

4.2.4. Peningkatan kualitas SDM melalui program Pembangunan berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Khususnya bagi daerah-daerah dengan wilayah perdesaan relatif luas, memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif besar dan memerlukan dukungan finansial untuk membiayai investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana,

maupun investasi non fisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber daya manusia.

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap konsisten untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan, kegiatan dan program pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan masyarakat. Diantara program pembangunan yang berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat yang akan tetap dilaksanakan pada tahun 2011 adalah :

a. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Tujuan pelaksanaan alokasi dana desa, antara lain :

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan bidang kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.

b. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan melalui Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bertujuan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi serta meningkatkan kepedulian pola hidup bersih. Disamping itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan, melaksanakan konstruksi, melakukan operasi dan pemeliharaan serta mengupayakan prasarana dan sarana yang dibangun agar tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Komitmen yang sangat kuat dari Pemerintah untuk mencapai target *Water Supply and Sanitation – Millenium Development Goals (WSS-MDGs)*, yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50% pada tahun 2015. Sedangkan kondisi saat ini, sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dirasakan masih belum memadai. Masih terdapat masyarakat yang belum dapat menikmati layanan air bersih dan juga sanitasi sehingga sangat perlu terus ditingkatkan. Namun untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat tentu saja membutuhkan dukungan sumber daya termasuk pembiayaan yang besar sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

c. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) merupakan program nasional dalam mewujudkan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kebijakan melaksanakan PNPM Mandiri adalah dengan mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Program yang dimulai sejak tahun 2007, PNPM Mandiri dilaksanakan dengan memperluas cakupan wilayah sasaran pelaksanaan P2KP dan PPK, dengan skema masing masing program, sebagai PNPM Mandiri Inti. Selanjutnya pada tahun 2008 mulai diterapkan PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan. Pada tahun 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri dapat menjangkau seluruh kecamatan Indonesia yang mencapai 5.623 kecamatan, dimana 1.072 kecamatan diantaranya merupakan kecamatan perkotaan.

Tujuan program PNPM Mandiri adalah :

- Mewujudkan masyarakat Berdaya dan Mandiri, yang mampu mengatasi berbagai kemiskinan di wilayahnya sejalan dengan kebijakan PNPM Mandiri.
- Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kelembagaan masyarakat serta pendekatan kemitraan masyarakat dengan pemerintah dan kelompok peduli setempat.
- Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan sesuai kebijakan PNPM Mandiri.
- Meningkatkan capaian manfaat program kepada Kelompok Sasaran (masyarakat miskin) semakin efektif, ditandai adanya peningkatan IPM-MDGs.

Proses Pemberdayaan masyarakat dititikberatkan pada fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat tingkat basis kelurahan (BKM), fasilitasi pengintegrasian program jangka menengah penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan (PJM Pronangkis 3 tahun) sesuai kebutuhan masyarakat dengan perencanaan pemerintah dan eskalasi realisasi PJM Pronangkis.

4.3. Membangun Ekonomi yang Tangguh Berbasis Kerakyatan

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka membangun ekonomi yang tangguh berbasis kerakyatan dalam bentuk program-program pembangunan sebagai berikut :

4.3.1. Pembangunan Pertanian Rakyat

Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian rakyat pemeran utama adalah petani yang selama ini bekerja keras untuk memperoleh panen yang sebanyak-banyaknya untuk ketersediaan cadangan pangan dan modal berbentuk uang dengan tujuan agar dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga petani sehari-hari.

Guna mengangkat harkat dan martabat petani menjadi *farmer* sejahtera melalui pembangunan pertanian rakyat. Maka pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dengan intervensi terbatas pada regulasi, pelayanan/Penyuluhan dengan pendampingan dan penggerak pengembangan (*agent of development*).

Strategi yang mendasar dalam pengembangan pertanian rakyat adalah penataan perdagangan dan pengolahan hasil panen komoditi tanaman pangan (padi, palawija, dan hortikura), dan perkebunan (sawit, karet, sagu, kelapa dan kopi).

Mengingat pentingnya pengembangan sektor pertanian rakyat Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membangun Rice Processing Complex (RPC) yang sampai saat ini operasionalisasinya sedang diupayakan agar produksinya lebih optimal. Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan revitalisasi cetak sawah di Kecamatan Siak Kecil seluas 1.500 hektar yang memiliki potensi sekitar 5.000 hektar, dan penyiapan lokasi persawahan baru di Kecamatan Rupert seluas 5.000 hektar. Kesemuanya ini dimaksud guna meningkatkan produksi pangan dan menyambut Operasi Riau makmur 2030.

4.3.2. Pembangunan Pertanian Rakyat Komoditas Tanaman Perkebunan

Pengembangan komoditi agribisnis perkebunan (sawit, karet, kelapa, sagu dan kopi) dengan teknologi seimbang dengan pasokan bahan baku hasil perkebunan rakyat, melalui rehabilitasi trio tata air dan peremajaan tanaman dan ternak ruminansia dengan teknologi *biocycle farming* dalam satu sistem dan manajemen pola kemitraan usaha pangan guna mewujudkan struktur ekonomi masyarakat yang tangguh sebagai landasan pusat tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah di wilayah pedesaan.

4.3.3. Pengembangan Industri berbasis Pertanian

Industri adalah pilar utama dalam menggerakkan ekonomi rakyat, karena dengan perubahan bentuk bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dalam arti siap dikonsumsi oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lokal atau antar daerah maupun domestik. Industri di Kabupaten Bengkalis didukung oleh potensi bahan baku yang berasal dari hasil pertanian, sehingga terwujud adanya agroindustri.

Pengembangan wilayah ekonomi berbasis sumberdaya alam yang diwujudkan dalam suatu program pembangunan pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk kedepan arahan pengembangan industri adalah berkembangnya industri kecil dan menengah yang dapat memanfaatkan bahan baku lokal sehingga terjadi peningkatan nilai tambah, menyerap tenaga kerja rumah tangga dan perputaran ekonomi masyarakat yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan usaha industri kecil dan menengah tersebut.

4.3.4. Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah

Kabupaten Bengkalis masih memiliki sejumlah potensi sumberdaya alam yang masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, namun kemampuan daerah secara totalitas masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama dalam hal permodalan, teknologi, dan keterampilan sumberdaya manusianya. Untuk itu pada masa mendatang kegiatan investasi masih sangat diperlukan, terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan dalam rangka transformasi teknologi yang dapat diadopsi oleh masyarakat tempatan, serta untuk menghadapi persaingan global yang bukan hanya mengandalkan pada keunggulan komperatif (*comperative advantage*) semata tetapi lebih diutamakan pada keunggulan dalam persaingan (*competitive advantage*).

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, diperlukan peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi, Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan Pengembangan Kawasan Penanaman Modal, serta penggalian dan pengembangan potensi unggulan Daerah.

4.4. Membangun Bidang Penunjang Lainnya

4.4.1. Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup akan dikembangkan ke arah pengelolaan yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan situasi dan kondisi yang sangat dinamis, juga harus proaktif terhadap penanganan permasalahan lingkungan hidup sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Beberapa

agenda yang menjadi fokus pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011 antara lain :

- Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- Penanggulangan abrasi pantai dan degradasi hutan mangrove.
- Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta dampak ikutannya.
- Monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan hidup.
- Pengelolaan persampahan.
- Pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Peningkatan ketersediaan basis data dan akses informasi lingkungan hidup.

b. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya peningkatan kualitas SDM bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis antara lain dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur melalui proses pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal. Peningkatan kualitas SDM sekaligus merupakan upaya peningkatan kinerja kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup juga dilakukan melalui optimalisasi penempatan pegawai dengan kompetensi, kualifikasi pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang memiliki relevansi dengan beban tugas yang diemban dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peningkatan dan penyempurnaan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis. Pemantauan dan pemeriksaan kualitas lingkungan secara swadaya khususnya terhadap sejumlah parameter yang memerlukan penanganan segera di lapangan saat ini telah dapat dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkalis sehubungan dengan telah tersedianya fasilitas laboratorium mini yang ditempatkan di BLH Kabupaten Bengkalis. Secara bertahap pemerintah Kabupaten Bengkalis akan berupaya untuk terus meningkatkan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup seperti penyediaan peralatan pemantauan kualitas

udara, air dan lain – lain termasuk mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Riau dan dari APBN (DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup) maupun dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

d. Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta *Stakeholders* Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peningkatan peran serta dan kerjasama dari seluruh komponen yang terlibat (*stakeholders*) menjadi sangat strategis dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sangat diperlukan mengingat permasalahan lingkungan hidup merupakan suatu yang sangat universal dan dinamis. Demikian pula dampaknya dapat mempengaruhi setiap komponen yang ada alam (biotik maupun abiotik) serta tidak dapat dibatasi secara administrasi kewilayahan. Pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara persial, melainkan harus dilakukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi, kerjasama dan meningkatkan peran serta masyarakat sangat diperlukan guna mewujudkan sinergi program / kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa bidang lingkungan hidup, khususnya penyelesaian di luar pengadilan atas prinsip saling menguntungkan antar pihak-pihak yang terlibat, telah menuntut peran aktif Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai fasilitator / mediator penyelesaian sengketa tersebut. Di sisi lain, pemahaman dan sudut pandang *stakeholders* yang terlibat terhadap permasalahan yang dihadapi serta bagaimana alternatif terbaik dalam penyelesaiannya juga merupakan penentu keberhasilan penyelesaian sengketa yang dihadapi. Sehingga setiap permasalahan yang timbul dapat ditanggulangi dengan lebih optimal.

4.4.2. Penataan Ruang

a. Perencanaan Tata Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan. Penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang penataan ruang di Kabupaten Bengkalis telah diupayakan untuk dapat diaplikasikan secara optimal dan secara konsisten dapat ditingkatkan. Dalam Konteks perencanaan

pengembangan wilayah, penyelenggaraan kewenangan bidang penataan ruang di Kabupaten Bengkalis mulai dari tahapan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan saat ini masih dilaksanakan secara koordiantif pada beberapa satuan kerja.

Beberapa agenda perencanaan tata ruang di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011 antara lain :

- Penyelesaian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis.
- Penyusunan Rencana Tata Ruang (Rencana Umum dan Rencana Rinci).
- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- Koordinasi Bidang Penataan Ruang.
- Pelatihan Aparatur Perencana Tata Ruang.
- Penguatan Kelembagaan Bidang Penataan Ruang.

b. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dalam upaya mewujudkan penataan ruang yang serasi, selaras dan seimbang serta terintegrasi diperlukan langkah-langkah yang mampu mensinergikan seluruh aspek perencanaan dengan upaya implementasi dari rencana tersebut secara benar dan konsisten. Selain produk tata ruang yang harus sinergi antara tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten / Kota, kawasan, hingga blok peruntukan, juga dituntut adanya kebijakan dan strategi yang lebih implementatif serta optimalisasi peran kelembagaan yang terkait dengan penataan ruang di daerah.

Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang. Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk mewujudkan konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian tata ruang akan menjadi salah satu instrumen penting dalam implementasi program-program pembangunan yang dilaksanakan khususnya program pembangunan yang melibatkan aspek spasial sebagai salah satu komponen pendukungnya.

Sejumlah agenda yang terkait dengan program pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011 antara lain :

- Survey dan pemetaan.

- Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Monitoring, evaluasi serta pelaporan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4.4.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepariwisata

Secara geografis Kabupaten Bengkalis terdiri dari wilayah Daratan dan Kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam, seperti : hutan, sungai, danau/ tasik dan sumber daya alam lainnya. Sedangkan secara kependudukan, masyarakat Kabupaten Bengkalis terdiri dari berbagai ragam etnis/ suku dan agama, sehingga memunculkan keragaman dan kekayaan budaya.

Kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis merupakan potensi besar yang perlu dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pihak yang terkait dalam rangka mengembangkan dan mengelola potensi tersebut. Potensi keindahan alam dan keragaman budaya tersebut merupakan kekuatan besar dalam mengembangkan sektor kepariwisataan di Kabupaten Bengkalis, seperti wisata pantai, wisata tasik dan wisata budaya serta wisata lainnya. Hal ini mengingat pariwisata dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup berarti. Disamping itu, pariwisata juga dapat dijadikan penggerak perekonomian daerah, karena kegiatan pariwisata banyak melibatkan sektor lainnya sebagai penunjang. Dengan dikembangkannya pariwisata di suatu lokasi, akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Keberhasilan pembangunan pariwisata juga membuka peluang berusaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat tempatan.

Pengembangan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan dijadikan salah satu objek wisata andalan di Provinsi Riau yaitu pengembangan objek wisata pantai Rupa Utara. Disamping itu juga terdapat objek wisata lainnya yang potensial untuk dikembangkan yaitu objek wisata pantai Selat Baru, objek wisata budaya dan sejarah di Bukit Batu serta ditempat lainnya.

Untuk mencapai tujuan pengembangan bidang kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyusun prioritas pembangunan yaitu :

- a. Meningkatkan pembangunan serta pengelolaan daerah tujuan wisata.
- b. Meningkatkan pengelolaan aset-aset warisan budaya.
- c. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata secara efektif.
- d. Memelihara dan melestarikan cagar budaya.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah merupakan lampiran yang berisi rekapitulasi Program dan Kegiatan serta pagu indikatif seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se- Kabupaten Bengkalis untuk Tahun Anggaran 2011. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2011 dibukukan pada buku II yang menjadi satu kesatuan dengan buku I ini.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2010 dengan mengikuti kaidah transisi sebagai mediasi periode berakhirnya masa pelaksanaan RPJMD tahun 2005 – 2010 dan mengawali pelaksanaan RPJMD tahun 2010 – 2015. dan merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 -2025 tahap kedua. Pencapaian yang direncanakan dalam satu tahun anggaran adalah tahapan perkembangan yang diharapkan pada pencapaian rencana jangka pendek yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan jangka panjang. Kebijakan dan Program yang dituangkan merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, juga merupakan lanjutan dari kebijakan dan program tahun sebelumnya, serta termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2011 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011 yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.